



## Menelisik praktik perhambaan di kampung Raja Prailiu, Sumba Timur: Sebuah kajian poskolonial dalam upaya memutus rantai perhambaan di era modern

Yusak Budi Setyawan<sup>1</sup>, Iston Uumbu Kura Lena<sup>2</sup>  
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

### Correspondence:

[iston85@gmail.com](mailto:iston85@gmail.com)

### DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v11i1.1287>

### Article History

Submitted: Dec. 13, 2024

Reviewed: Jan. 28, 2025

Accepted: Feb. 20, 2025

### Keywords:

slavery;  
Maramba and Ata;  
subaltern theory;  
social stratification;  
Sumba;  
perhambaan;  
Maramba dan Ata;  
stratifikasi sosial

Copyright: ©2025, Authors.

License:



**Abstract:** In this modern era, the practice of slavery in various forms can be found in multiple places in the world, including in Raja Prailiu Village, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. This practice has been carried out by the Maramba (nobles) against the Ata (servants). This causes injustice and discrimination for the Ata people, who even experience violence, both physical and psychological. This research aims to study why this practice continues to be maintained and perpetuated, as well as propose efforts to break the chain of this kind of slavery so as not to cause further social problems, especially for the Ata. This research uses qualitative methods with a postcolonial approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. This research concerns efforts to eliminate various slavery practices in society, especially in Raja Prailiu Village. This research found that this practice continues to occur because, as subalterns, the Ata's voices are not heard, their experiences are silenced, and there is no "space" for them to speak out. This research concludes that the voices of the Ata as subalterns need to be heard in public spaces.

**Abstrak:** Di era modern seperti sekarang ini, praktik perhambaan dalam berbagai bentuk (tradisional maupun modern) dapat ditemukan di berbagai tempat di dunia, termasuk di Kampung Raja Prailiu, Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur. Praktik ini dilakukan oleh para Maramba (kaum bangsawan) terhadap kaum Ata (hamba). Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi kaum Ata yang bahkan mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengapa praktik tersebut terus dipertahankan dan dilestarikan, serta mengusulkan upaya untuk memutus rantai perhambaan semacam ini agar tidak menimbulkan persoalan sosial lanjutan, terutama bagi kaum Ata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan poskolonial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menghapus segala bentuk praktik perhambaan di masyarakat, khususnya di Kampung Raja Prailiu. Dengan menggunakan teori subaltern dari Gayatri Spivak ditemukan bahwa praktik tersebut terus terjadi karena kaum Ata sebagai subaltern suara mereka tidak terdengar, pengalaman mereka dibungkam dan tidak ada "ruang" bagi mereka untuk bersuara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suara-suara kaum Ata sebagai subaltern perlu diperdengarkan di ruang-ruang publik.

## Pendahuluan

Praktik perhambaan dapat ditemukan di Sumba. Uumbu Aman, seorang warga Kampung Adat Praiyawang, Rindi, Sumba Timur, membenarkan bahwa masih ada praktik perhambaan konvensional seperti yang dialami kaum *Ata*.<sup>1</sup> Praktik perhambaan tersebut dilakukan oleh kaum *Maramba*. Namun demikian, tradisi ini masih dipertahankan di wilayah Sumba Timur,<sup>2</sup> seperti di Kampung Raja Prailiu (yang untuk selanjutnya kami sebut KRP). Praktik tersebut tidak terlepas dari stratifikasi sosial dan pengaruh relasi kuasa yang timpang di mana yang satu (*Maramba*) mendominasi yang lain (*Ata*). Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial (*social stratification*) merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan dalam suatu masyarakat. Dalam stratifikasi sosial masyarakat Sumba, para *Maramba* (raja dan bangsawan) merupakan golongan yang menduduki puncak tertinggi dalam piramida sosial maupun kekuasaan. Sedangkan kaum *Ata* atau hamba adalah golongan orang-orang yang berada paling rendah, dan karena itu mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan. Stratifikasi sosial dan relasi kuasa yang tidak setara ini telah berakar dan terkonstruksi sedemikian rupa dalam kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat di Sumba, meski hal tersebut bertentangan dengan ajaran Kristen yang dianut oleh para *Maramba* dan *Ata*. Fenomena sosial di Sumba ini sangat menarik untuk diteliti dengan harapan agar dapat memberikan pertimbangan kritis untuk memutus atau menghapus praktik perhambaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kampung Raja Prailiu.

Penelitian terkait praktik perhambaan di Sumba telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, misalnya yang dilakukan Elsy Amma, DY Meyners, HR Udju,<sup>3</sup> Yiwa<sup>4</sup> dan Syane Rambu Lubu.<sup>5</sup> Penelitian-penelitian tersebut menyoroti perhambaan dalam konteks HAM, Pendampingan KeIndonesiaan dan Teologi Feminis. Artikel ini melihat celah penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan menawarkan kebaruan, tidak hanya dari segi judul dan lokus penelitian yang berbeda, tetapi juga dari segi pendekatan yang digunakan, yakni menggunakan analisa atau kajian poskolonial terkait praktik perhambaan di pulau Sumba, khususnya di KRP. Kajian Poskolonial merupakan sebuah pendekatan yang paling relevan untuk digunakan dalam menyoroti praktik perhambaan di KRP, karena dalam pendekatan ini melibatkan wacana dan praktik-praktik kolonialisme yang memiliki keterkaitan penting dengan awal mula munculnya praktik perhambaan di Sumba. Penelitian ini akan memfokuskan pada rumusan masalah yaitu apa yang melatarbelakangi praktik perhambaan di KRP? Bagaimana memutus rantai perhambaan di KRP pada era modern? Senada dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, menganalisa dan mendeskripsikan latar belakang terjadinya praktik perhambaan di KRP. *Kedua*, mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk memutus rantai perhambaan di KRP pada era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perhambaan terus dilanggengkan di masyarakat Sum-

---

<sup>1</sup> Aloysius Budi Kurniawan, "Jejak Purba Relasi Tuan-Hamba," <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/04/15/jejak-purba-relasi-tuan-hamba> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 12.22).

<sup>2</sup> Ahmad Arif, "Perjuangan Hamba Menjadi Setara," <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2019/07/17/perjuangan-hamba-menjadi-setara> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 14.47).

<sup>3</sup> ESR. Amma, DY Meyners, HR Udju, "Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *JIST* Vol. 4. No. 6 (Juni, 2023), 5-654. Dapat diakses di: <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/629/1144>.

<sup>4</sup> MF Yiwa, *Maramba dan Ata di Patabahi Sumba Timur Dari Perspektif Pendampingan keIndonesiaan* (Salatiga: Repositori UKSW, 2023). Dapat diakses di: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/32156>.

<sup>5</sup> Syane Rambu Lubu, *Kekerasan Terhadap Hamba Perempuan di Sumba Timur: Suatu Tinjauan Teologis Feminis* (Yogyakarta: Katalog UKDW, 2011). Dapat diakses di: <http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/5418>.

ba, khususnya di KRP yaitu karena adanya stratifikasi sosial yang kemudian terkonstruksi begitu kuat di masyarakat karena dianggap sebagai budaya orang Sumba. Dampak dari hal tersebut kemudian menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara; yang satu mendominasi yang lain di mana kaum *Maramba* sebagai golongan atas (*superior*) menguasai dan mengontrol kaum *Ata* sebagai golongan paling bawah (*inferior*). Oleh karena itu upaya untuk memutus rantai perhambaan tersebut adalah dengan mendengarkan dan memperdengarkan (menyuarkan) kembali pengalaman kaum *Ata* di ruang-ruang publik, yang tidak terdengar karena dibungkam dan dimarginalkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Dalam temuan kami, untuk memutuskan rantai perhambaan tersebut, kaum *Ata* perlu diberikan “ruang” untuk bersuara.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata serta bahasa.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan poskolonial. Pendekatan ini muncul dari konteks Dunia Ketiga (Global South) pada sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan munculnya buku karangan Edward Said yang berjudul *Orientalisme* (1978).<sup>7</sup> Sugirtharajah, salah seorang tokoh poskolonial dari India, mengatakan bahwa pendekatan poskolonial mengikut sertakan wacana kolonialisme dan imperialisme di dalamnya sebagai isu penting.<sup>8</sup> Oleh karena pendekatan ini lahir dari konteks Dunia Ketiga, termasuk Asia, maka pendekatan ini dirasa lebih tepat mengenai untuk mengkaji dan menganalisis praktik perhambaan yang terjadi di KRP - Sumba Timur, karena praktik perhambaan terkait erat dengan wacana kolonialisme di dalamnya. Setyawan mengatakan bahwa pendekatan poskolonial sangat kontekstual dan sangat urgen untuk digunakan di Indonesia karena melibatkan pengalaman atau konteks Dunia Ketiga yang selama ini diabaikan dalam perjuangan untuk kemanusiaan.<sup>9</sup> Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah “mendengarkan” dan “memperdengarkan kembali” pengalaman ketertindasan, ketidakadilan dan kekerasan yang dialami kaum *Ata* sebagai sebuah upaya untuk memutus rantai perhambaan di Sumba.

Mengingat entitas *Ata* di Sumba dapat digolongkan sebagai *subaltern*, maka kami menggunakan pandangan atau teori “subaltern” dari Gayatri Spivak. *Subaltern* menunjuk pada kaum tertindas dan termarginalkan dalam wacana poskolonial, seperti hamba atau budak. Dalam bukunya,<sup>10</sup> Spivak katakan bahwa pengalaman kelompok-kelompok yang termarginalkan dan ditindas oleh para penguasa pada era kolonialisme dibungkam, “*There is no space from which the sexed subaltern subject can speak.*”<sup>11</sup> Spivak menekankan bahwa penindasan dan marginalisasi yang dialami oleh *subaltern* disebabkan oleh dominasi struktural dalam masyarakat kolonial. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk memutus praktik perhambaan di Sumba, khususnya di KRP, suara kaum *Ata* harus didengarkan dan diperdengarkan kembali di ruang-

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

<sup>7</sup> Puji Santosa, *Kritik Poskolonial: Jaringan Sastra Atas Rekam Jejak Kolonialisme* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012), 2.

<sup>8</sup> R. S. Sugirtharajah, *Charting the aftermath: a review of Postcolonial Criticism dalam The Postcolonial Biblical Reader* (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), 17.

<sup>9</sup> Yusak B. Setyawan, *The Use of the Haustafel of Ephesians in the Socio-Political Context of Graeco-Roman Society: A Postcolonial Perspective Drowning Upon Indonesian Christianity's Ecounter With the state Ideology of the Pancasila* [dissertation] (Adelaide, Australia: School of Theology Flinders University, 2009), 1-94.

<sup>10</sup> Gayatri C. Spivak, *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea* Ed. by Rosalind Morris (Columbia: Columbia University Press, 2010).

<sup>11</sup> R Guha, Gayatri C. Spivak, *Selected Subaltern Studies* (New York: Oxford University Press, 1988), 3-4.

ruang publik. Kaum *Ata* adalah *subaltern* yang selama ini mengalami penindasan dari kaum *Maramba*, diperlakukan dengan tidak adil dan rentan mengalami berbagai kekerasan akibat dominasi kaum *Maramba* serta dimarginalkan karena berasal dari golongan terendah di masyarakat Sumba Timur. Mengingat dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dan pendekatan poskolonial, maka kami tidak hanya sekedar memaparkan hasil penelitian secara deskriptif tetapi sekaligus sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap praktik perhambaan yang dilakukan kaum *Maramba* terhadap kaum *Ata*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

## Praktik Perhambaan di Kampung Raja Prailiu, Sumba Timur

Pembahasan tentang praktik perhambaan di Kampung Raja Prailiu perlu diawali dengan penjelasan tentang praktik perhambaan dalam konteks masyarakat Sumba. Pulau Sumba terletak di kawasan Indonesia bagian Timur, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau ini terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pulau ini pernah diduduki oleh pemerintah Belanda sekitar abad ke 19<sup>12</sup> dan Jepang pada abad ke 20, yaitu antara tanggal 14 Mei 1942 sampai 1945.<sup>13</sup> Sebagai sebuah koloni, praktik perhambaan dan perdagangan hamba merupakan sesuatu yang umum dilakukan pada saat itu. Hal ini dapat dilihat misalnya pada tahun 1866, Pemerintah Belanda mengutus seorang Kontrolir bernama S. Roos yang berkedudukan di Kambaniru, Sumba Timur, untuk mengawasi penjualan hamba *sahaya* (sebutan bagi seorang hamba atau budak yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuannya).<sup>14</sup> Bahkan salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan di Nusa Tenggara sebelum abad ke-20 selain kayu cendana, kuda Sumba (*Sandelwood*), dan hasil bumi yang lain, adalah para hamba atau budak.<sup>15</sup> Hamba atau budak pada zaman itu merupakan suatu barang komoditas (properti) yang penting karena dianggap dapat menolong berbagai pekerjaan tuan atau majikannya. Mereka dapat dijual, ditukar atau diperdagangkan seperti barang dagangan lain. Hoskins mencatat bahwa hingga dekade kedua abad ke-20, kepulauan Sumba masih mengirimkan budak dalam jumlah yang signifikan melalui kapal-kapal dagang Belanda.<sup>16</sup>

Kapan tepatnya praktik perhambaan terjadi di Sumba tidak diketahui secara pasti. Namun hal tersebut dianggap mulai muncul dengan adanya kaum *Ata* atau hamba di Sumba. Munculnya kaum *Ata* dapat dilihat dari segi sejarah dan mitos yang berkembang di Sumba. Asal usul munculnya para hamba atau budak, yakni kaum *Ata* diduga sudah ada pada abad ke XVI sebelum kehadiran VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yaitu ketika orang-orang Eropa datang ke Sumba.<sup>17</sup> Mereka datang ke Sumba dalam rangka dagang, yakni dengan membeli kayu cendana, kuda dan lain sebagainya, lalu mereka tukarkan dengan berbagai macam barang pecah belah, kain, bermacam-macam muti (perhiasan) dan barang-barang lainnya dari Eropa. Dari mereka inilah orang-orang Sumba mendapat meriam, bedil dan mesiu. Hal

---

<sup>12</sup> Alex Japalatu, "Jejak Kolonial di Pulau Sumba: Dari Perang Hingga Sistem Pemerintahan." Dapat diakses di: <https://www.kompasiana.com/alexjapalatu3508/62fc3f8b3555e43a3a252002/jejak-kolonial-di-pulau-sumba-dari-perang-hingga-sistem-pemerintahan> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 06.46).

<sup>13</sup> F. D. Wellem, Injil & Marapu (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 239-240.

<sup>14</sup> Oe. H. Kapita, Sumba di Dalam Jangkaun Jaman (Jakarta: BPK GM, 1976), 28.

<sup>15</sup> Nuryahman, "Perdagangan Budak di Nusa Tenggara Sampai Pada Abad ke-19," (Bali: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT, 2018), 6.

<sup>16</sup> Janet Hoskins, "Slaves, Brides and Other 'Gift': Resistance, Marriage and Rank in Eastern Indonesia," *Slavery & Abolition: A journal of Slave and Post-Slave Studies* Vol. 25 No. 2 (Agustus, 2004), 94. <https://doi.org/10.1080/0144039042000293063>.

<sup>17</sup> Dorkas Jami dan David Samiyono, *Maramba dan Ata* (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW Press, 2009), 2-3.

ini kemudian mendorong para bangsawan, *kabihu-kabihu* di Sumba untuk mengadakan peperangan antar-suku dan orang-orang yang kalah perang inilah yang kemudian ditawan dan dijadikan hamba *sahaya*.<sup>18</sup> Pada masa kedatangan VOC di Pulau Sumba, perdagangan hamba atau budak biasa dipraktikkan, karena VOC memanfaatkan mereka untuk kepentingan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja ataupun sebagai penghibur (pekerja seks). Bahkan, raja-raja di Sumba memberikan hadiah budak kepada pegawai VOC di Kupang maupun Batavia (Jakarta) sebagai tanda persahabatan pada tahun 1700-an.<sup>19</sup> Secara historis, mereka yang dijadikan hamba atau budak adalah mereka yang berhutang, melanggar hukum, tawanan perang dan yang memperhamba mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan, yaitu para raja dan bangsawan. Namun munculnya perhambaan di Sumba juga disebabkan oleh situasi ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga mereka kemudian “menjual” diri mereka kepada para bangsawan untuk dijadikan hamba atau budak. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari juga untuk membayar pajak pada pemerintah Belanda pada waktu itu.<sup>20</sup> Namun menurut mitos yang berkembang di Sumba, munculnya hamba *sahaya* ini awal mula dibawa oleh para *Marapu*, leluhur orang Sumba, ketika mereka menempati Pulau Sumba.<sup>21</sup> Mereka tinggal berdasarkan “*kabihu*” (suku atau klan). Ketika para *Marapu* ini menempati Pulau Sumba, mereka mendapati penduduk di Sumba masih sangat rendah sumber daya manusianya sehingga dengan mudah mereka ditaklukkan dan dijadikan hamba.<sup>22</sup>

Praktik perhambaan yang dilakukan oleh kaum *Maramba* terhadap kaum *Ata* terlihat dengan sangat jelas di KRP. Kampung ini terletak di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera, kurang lebih 2 km dari pusat kota Waingapu, Sumba Timur - NTT. Kampung ini merupakan kampung tertua di Kabupaten Sumba Timur yang pada zaman Belanda menjadi bagian atau ibukota Kerajaan Lewa-Kambera. Berdasarkan penuturan dari Ibu Tamu Rambu Margaretha, istri dari Tamu Umbu Djaka raja Prailiu, bahwa kampung ini berdiri sesudah pendudukan Jepang di Sumba. Menurut letaknya yang sekarang ini, KRP ini terbagi menjadi dua yaitu KRP Kiku atau disebut juga dengan Prailiu bawah dan KRP Kambata atau disebut juga dengan Prailiu atas. Menurut sejarahnya, KRP Kiku yang pertama kali berdiri sejak pemerintahan Belanda masuk di Sumba, di mana rajanya berasal dari Lewa - Sumba Timur. Lalu sesudah pendudukan Jepang, barulah KRP Kambata berdiri.<sup>23</sup>

Raja terakhir yang memerintah di KRP Kambata bernama Bapa Tamu Umbu Djaka. Ia memiliki seorang istri yang bernama Ibu Tamu Rambu Margaretha, seorang perempuan bangsawan dari Lewa, Sumba Timur. Mereka dikarunia 8 orang anak dan saat ini hampir semua anak-anaknya sudah berkeluarga dan tidak lagi menetap di Prailiu. Hanya 2 orang anak laki-laki saja yang tinggal di Prailiu yaitu Umbu Remi dan Umbu Napa Tamu. Namun sejak beliau wafat pada tahun 2008, kepemimpinan di Prailiu diteruskan oleh anak laki-laki yang bernama Umbu Remi. Sebagai golongan bangsawan, mereka memiliki *Ata pusaka* yang

<sup>18</sup> Oe. H. Kapita, *Sumba Dalam Jangkauan Jaman* (Jakarta: BPK GM, 1976), 18.

<sup>19</sup> Daniel Tagukawi, “Darurat TPPO, Stop Perbudakan Modern Anak Sumba,” <https://sumbanews.com/wp-content/uploads/2023/08/SUMBANEWS-03.pdf> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 16.11).

<sup>20</sup> Kornelis Kewa Ama, “Nasib Perempuan Sumba dan Pengakuan Komunitas Agama Asli Marapu,” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/04/21/nasib-perempuan-sumba-dan-pengakuan-komunitas-agama-asli-marapu> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 17.48).

<sup>21</sup> Jami dan Samiyono, *Maramba dan Ata*, 1-2.

<sup>22</sup> Jami dan Samiyono, *Maramba dan Ata*, 2.

<sup>23</sup> Ronald, “Kampung Raja Prailiu Kambata Sebuah Pertemuan Antara Budaya dan Kekristenan di Sumba Timur,” <https://www.majalahgaharu.com/2019/12/30/kampung-raja-prailiu-kambata-sebuah-pertemuan-antara-budaya-dan-kekristenan-di-sumba-timur/> (diakses pada 13 Des 2024, pukul 06.52).

siap untuk melayani segala keperluan atau kebutuhan mereka, mulai dari mengurus rumah hingga pekerjaan di luar rumah seperti di sawah, kebun, di ladang dan lain sebagainya. Bahkan ibu Tamu Rambu Margaretha sendiri membawa *Ata Ngandi* (hamba bawaan) dari keluarga di Lewa. Berapa jumlah *Ata* yang mereka miliki tidak dapat dipastikan jumlahnya, mengingat kaum *Ata* tersebut ada yang tinggal di Prailiu tapi juga ada yang tinggal di luar Prailiu karena menikah atau karena bekerja, sehingga sulit untuk didapatkan angka yang pasti.

Dari data yang diperoleh terkait jumlah warga di Kampung Raja Prailiu Kambata, diketahui bahwa jumlah kepala keluarga (kk) per Desember 2024 yaitu berjumlah 96 kk dengan total warga sekitar 373 jiwa (laki-laki 202 jiwa, perempuan 171 jiwa),<sup>24</sup> yang hampir sepertiga dari jumlah warga tersebut merupakan kaum *Ata*. Terkait dengan kepercayaan yang dianut, kaum *Ata* tersebut menganut kepercayaan Kristen, menggantikan kepercayaan sebelumnya, yakni *Marapu*, sama seperti tuan mereka Bapa Tamu Umbu Djaka. Bapa Tamu Umbu Djaka sendiri bersama keluarga baru dibaptis pada tahun 2007 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Prailiu, cabang dari GKS Payeti Waingapu.<sup>25</sup> Akan tetapi, sesudah mereka menjadi Kristen tidak serta merta menghapus praktik perhambaan di KRP karena hal tersebut dianggap sudah ada secara turun temurun dan dianggap sebagai budaya Sumba, khususnya kaum *Maramba*. Walaupun demikian, terjadi perubahan dalam praktik perhambaan, yakni kaum *Ata* yang semula diperlakukan dengan tidak adil, dimarginalkan bahkan rentan mengalami kekerasan, sekarang sudah tidak ditemukan lagi di KRP Kambata. Kaum *Ata* yang ada di sana diperlakukan dengan baik dan dihargai sebagai ciptaan Tuhan, meskipun identitas diri mereka sebagai kaum *Ata* tidak dapat dihapus atau dihilangkan melainkan terus melekat sampai mati.<sup>26</sup> Berbeda dengan di KRP Kiku, kaum *Ata* diperlakukan dengan tidak adil, dimarginalkan bahkan mengalami kekerasan sehingga ada dari mereka yang kemudian melarikan diri dari tuannya.

## **Kaum Ata sebagai Golongan Terendah dalam Stratifikasi Sosial Masyarakat di Sumba Timur**

Perhambaan yang terjadi di Sumba, yang dilakukan oleh kaum *Maramba* terhadap kaum *Ata* tidak terlepas dari adanya stratifikasi sosial dan relasi kuasa yang begitu kuat di dalamnya. Secara terminologi sistem *Maramba-Ata* berasal dari bahasa Sumba Timur yang terdiri dari dari dua kata yaitu *Maramba* yang artinya raja atau bangsawan dan *Ata* yang artinya hamba atau budak. Maka dalam arti luas sistem *Maramba-Ata* adalah sistem adat raja-hamba yang sudah berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang untuk mempertahankan stratifikasi sosial dan wilayah kekuasaan serta dalam menguasai harta maupun hamba.<sup>27</sup> Praktik perhambaan terjadi karena adanya stratifikasi sosial. Ini menyebabkan terjadinya lapisan-lapisan, golongan-golongan dalam masyarakat yang mengakibatkan status sosial menjadi tampak nyata dalam masyarakat Sumba.<sup>28</sup> Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya praktik perhambaan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Maryana Hori Mage selaku ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Prailiu, Waingapu pada 24 Agustus 2024, pukul 16.10.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Tamu Rambu Margaretha di Prailiu pada 25 Agustus 2024, pukul 16.40.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Mboku NN di Prailiu pada 26 Agustus 2024, pukul 17.30.

<sup>27</sup> Elsy S.R. Amma, David Y. Meyners, Hernimus Ratu Udju. "Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 4, No. 6 (Juni, 2023), 649. Doi: 10.59141/jist.v4i6.629.

<sup>28</sup> Jessica Tirza Felle dan Armin Sukri Kana, "Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan Dalam Tradisi Suku Sumba," *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2021), 51. Dapat juga dilihat di <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/>, (diakses pada 06 Des 2024, pukul 18.55).

yang menandakan perbedaan dalam kehidupan status ekonomi dan sosial masyarakat dan hal ini biasanya ditandai dengan adanya tuan dan hamba, *Maramba dan Ata*.<sup>29</sup> Dalam stratifikasi sosial, sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, yakni berada dalam suatu lapisan (*stratum*).

Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki, dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.<sup>30</sup> Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatannya dalam suatu kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto stratifikasi sosial merupakan pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaan kedudukannya secara vertikal.<sup>31</sup> Hal ini biasanya dilatarbelakangi karena adanya perbedaan status atau kedudukan dan peran di masyarakat. Perwujudannya adalah terciptanya lapisan-lapisan dalam masyarakat yang disebut sebagai strata sosial (kelas tinggi dan kelas rendah; kelas atas dan kelas bawah). Sejalan dengan Soekanto, Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk ke dalam suatu kelas-kelas yang berupa tingkatan atau hierarki.<sup>32</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu sistem yang membedakan status sosial dalam masyarakat yang berlaku.<sup>33</sup> Stratifikasi sosial menurut Max Weber yaitu suatu penggolongan masyarakat dalam sistem sosial pada tingkatan menurut *privilege*, *prestise*, dan kekuasaan.<sup>34</sup>

Elemen-elemen yang menjadi dasar dari pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat antara lain kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan kehormatan. Salah satu fungsi dari adanya stratifikasi sosial di masyarakat yaitu untuk menentukan simbol status atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto ada 3 sifat dari stratifikasi sosial yaitu stratifikasi terbuka (*Opened Social Stratification*), stratifikasi sosial tertutup (*Closed Social Stratification*) dan stratifikasi campuran (*Mixed Social Stratification*).<sup>35</sup> Stratifikasi sosial terbuka itu bersifat dinamis sehingga memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi ke atas (*social climbing*) atau ke bawah (*social sinking*), misalnya lewat pendidikan. Sebaliknya, dalam stratifikasi sosial tertutup bersifat statis dan karena itu tidak ada peluang untuk berpindah posisi, misalnya melalui kelahiran. Sedangkan stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Individu yang mengalami stratifikasi campuran hanyalah mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup, kemudian berpindah ke masyarakat yang menganut sistem stratifikasi terbuka, misalnya orang dari kasta Brahmana di Bali dapat berpindah ke kasta yang lebih rendah.<sup>36</sup> Dari penjelasan Soekanto tersebut, maka stratifikasi sosial masyarakat di Sumba itu bersifat tertutup.

---

<sup>29</sup> Felle dan Kana, "Analisis Pandangan Gereja," 52.

<sup>30</sup> Indianto Muin, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 48.

<sup>31</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), 13.

<sup>32</sup> Pitirim Aleksandrovich Sorokin, *Social and Cultural Mobility* (London: Free Press, 1959), 11.

<sup>33</sup> Rizqon Halal Syah Aji, "Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol. 2 No. 1 (Juni, 2015), 36.

<sup>34</sup> Ira Fatmawati, Nailir R. Sarmadiyah, Devi Z. Rosyidah, "Stratifikasi Sosial Masyarakat Minang Pada Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka (Stratifikasi Sosial Max Weber)," *Jurnal LESTARI: Bahasa dan Sastra* Vol. 02 No. 02 (April-Juni, 2024), 41.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982), 256.

<sup>36</sup> Salsabila Nanda, "Stratifikasi Sosial: Bentuk, Jenis, Fungsi, dan Sifatnya," <https://www.brainacademy.id/blog/stratifikasi-sosial> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 20.23).

Dalam stratifikasi sosial masyarakat Sumba, terdapat tiga golongan masyarakat yaitu Golongan *Maramba*, Golongan *Kabihu* (Orang Merdeka) dan Golongan *Ata* (Hamba).<sup>37</sup> Golongan *Maramba* (raja dan bangsawan) adalah golongan orang-orang yang menduduki puncak tertinggi dalam piramida sosial maupun kekuasaan. Para *Maramba* atau bangsawan ini adalah orang-orang yang menang ketika terjadi perang antarsuku, mempunyai banyak kekayaan dan hamba.<sup>38</sup> Oleh karena itu para *Maramba* menjadi orang-orang yang sangat dihormati dan memiliki kuasa serta pengaruh yang kuat di tengah masyarakat baik dari segi ekonomi, politik dan budaya. Di samping itu juga mereka memiliki harta yang melimpah (tanah, hewan, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya). Hal ini kemudian semakin mengukuhkan kedudukan mereka di tengah masyarakat Sumba sebagai golongan kelas atas. Golongan yang kedua adalah *Kabihu* atau orang *Merdeka*. Meskipun kedudukan mereka berada di bawah kaum *Maramba*, tetapi mereka cukup dihormati di tengah masyarakat Sumba dan merupakan rekan kerja dari kaum *Maramba*. Sedangkan kaum *Ata* atau hamba mereka adalah golongan orang-orang yang berada paling rendah dan bekerja atau mengabdikan untuk kaum *Maramba*.

Keberadaan hamba atau *Ata* dalam keluarga *Maramba* sangat penting untuk menunjukkan kedudukan sosial kaum *Maramba*, “sebagai alat untuk menunjukkan status, *prestise*, kekayaan, harta benda, dan kekuasaan.”<sup>39</sup> Semakin banyak jumlah *Ata* yang dimiliki oleh kaum *Maramba*, maka semakin besar pula kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki para *Maramba*, khususnya dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat Sumba. Seorang *Ata* atau hamba harus patuh dan taat pada semua perintah yang diperintahkan oleh raja atau tuannya, yaitu kaum *Maramba*.<sup>40</sup> Sebab para *Ata* ini adalah milik atau *properti* dari para *Maramba* dan sulit bagi mereka untuk lepas dari status sebagai seorang *Ata* atau hamba, sebab sistem stratifikasi sosial di masyarakat Sumba itu bersifat tertutup (artinya tidak ada “ruang” atau kesempatan bagi kaum *Ata* untuk berpindah status menjadi orang *Merdeka* apalagi menjadi kaum *Maramba*). Mereka hanya dapat lepas atau hidup bebas di tengah masyarakat jika sang tuan itu sendiri yang menghendaki mereka untuk bebas atau karena mereka ingin membebaskan diri. Namun hal ini jarang sekali terjadi di Sumba. Bahkan kaum *Ata* yang memiliki anak, dengan sendirinya anak-anak mereka akan dijadikan sebagai hamba dan menyandang status sebagai *Ata*. Hal ini telah berlangsung secara turun temurun.

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kaum *Ata* atau hamba merupakan golongan terendah dalam stratifikasi sosial masyarakat di Sumba. Menurut Wellem golongan ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu hamba *pusaka* (*Ata memang*, *Ata ndai*) dan hamba yang baru (*Ata bidi*).<sup>41</sup> Hamba *pusaka* adalah golongan hamba yang sejak semula memang status mereka sebagai hamba. Nenek moyang orang Sumba dulu ketika datang ke Sumba sudah membawa hamba-hamba mereka. Tiba di Sumba, mereka juga mengambil hamba dari penduduk yang telah berada di Sumba. Baik hamba yang dibawa dari luar maupun yang diambil di Sumba, mereka disebut sebagai hamba besar (*Ata Bokulu*). Mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa dimata tuannya. Mereka sering dijadikan sebagai jurubicara, bendahara, pengawal kepercayaan tuannya, bahkan sang tuan memberi mereka sejumlah ternak untuk dipelihara. Meskipun status atau kedudukan mereka sebagai seorang hamba, namun di masyarakat mereka dihormati, seperti menghormati tuannya. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Kapita, *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, 40.

<sup>38</sup> Jami & Samiyono, *Maramba dan Ata*, 3.

<sup>39</sup> A. Twikromo, *The local Elite and the Appropriation of Modernity*, (Yogyakarta: Kanisius Publishing House, 2008), 19.

<sup>40</sup> Elsy S.R. Amma dkk, “Keberadaan Kasta,” 648.

<sup>41</sup> Wellem, *Injil dan Marapu*, 38-40.

hamba yang baru adalah golongan hamba yang sebelumnya tidak termasuk anggota rumah raja atau bangsawan. Mereka disebut sebagai hamba kecil (*Ata kudu*). Mereka menjadi hamba karena dibeli atau tertawan dalam peperangan. Hamba yang dibeli disebut hamba belian (*Ata pakei*) sedangkan hamba yang didapatkan karena tawanan perang disebut hamba tawanan (*Ata payyapa*).

Selain itu, ada juga hamba bawaan (*Ata ngandi*) yaitu hamba yang diberikan oleh orang tua perempuan dan laki-laki kepada anak mereka ketika mereka kawin. Pada umumnya hamba bawaan ini berasal dari golongan hamba *pusaka*. Dari semua kelompok hamba yang ada di Sumba, hamba tawanan inilah yang memiliki nasib paling buruk. Mereka diperlakukan sebagai manusia pekerja bagi tuannya. Mereka menggarap ladang dan sawah serta menjaga dan memelihara ternak tuannya. Mereka adalah properti tuannya. Para hamba dapat menjadi orang bebas kembali karena beberapa hal, yaitu karena keturunan tuannya telah punah, karena ia dibebaskan oleh tuannya berkat jasa-jasanya, atau karena hamba tersebut membebaskan dirinya sendiri.<sup>42</sup> Pada masa pemerintahan Belanda di Sumba, para hamba baru ini dibebaskan dari status hambanya. Namun para hamba *pusaka* tidak dibebaskan, tetapi mereka menjadi anggota keluarga raja atau bangsawan. Mereka lalu mendapat sebutan baru, yaitu Anak Dalam Rumah (*Ana la kuru uma*), sehingga secara teoritis perhambaan di Sumba telah terhapus walaupun pada praktiknya masih tetap berlangsung di kalangan para *Maramba* hingga saat ini.<sup>43</sup>

Sekalipun kaum *Ata* menempati posisi yang terendah dalam stratifikasi sosial masyarakat Sumba, di KRP Kambata mereka diperlakukan dengan lebih manusiawi dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang masih mempertahankan praktik perhambaan di Sumba Timur, khususnya di KRP Kiku. Dari penuturan yang disampaikan oleh salah satu *Ata* yang berada di KRP Kambata, dikatakan bahwa meskipun ia dan keluarga adalah kaum *Ata*, tetapi mereka diperlakukan dengan sangat hormat dan dihargai sebagai seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat oleh Ibu Tamu Rambu Margaretha dan keluarga, seperti yang disampaikan dalam wawancara:

Sebagai seorang *Maramba*, ibu Tamu Rambu Margaretha dapat saja memanggil atau menyuruh seseorang (*Ata* yang lain) ke rumah saya jika beliau membutuhkan sesuatu untuk saya lakukan. Tetapi beliau justru datang ke rumah saya dan menyampaikan secara langsung apa keinginan beliau bahkan disertai dengan permintaan “tolong,” sesuatu yang tidak lazim dilakukan atau diucapkan oleh seorang *Maramba* terhadap hambanya.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada umumnya seorang *Ata* di Sumba seringkali diperlakukan dengan tidak adil. Mereka dituntut untuk bekerja siang dan malam demi memenuhi segala kebutuhan tuannya, tetapi kesejahteraan mereka tidak dipedulikan. Misalnya ketika seorang *Ata* mengalami sakit dan menyebabkan ia tidak dapat bekerja seperti biasa, maka *Ata* tersebut dipaksa untuk tetap bekerja oleh tuannya sekalipun berada dalam kondisi lemah tubuh. Bahkan jika *Ata* tersebut tidak menuruti keinginan tuannya, maka sang tuan tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan kata-kata penuh cacian bahkan memukul si *Ata*.<sup>45</sup> Kekerasan psikis maupun fisik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan bagi sang *Ata*. Sekalipun mereka sudah mengabdikan sangat lama kepada tuannya, dalam kehidupan sehari-hari mereka diabaikan bahkan dipinggirkan dari kehidupan tuannya dan juga masyarakat. Namun berbeda halnya dengan kaum *Ata* yang ada di KRP Kambata. Keluarga raja Prailiu

<sup>42</sup> Kapita, Masyarakat Sumba dan Adat Istiadat, 52-54.

<sup>43</sup> Wellem, Injil & Marapu, 40.

<sup>44</sup> Wawancara dengan ibu MHM di Prailiu, pada tanggal 27 Agustus 2024, pukul 15.30.

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak M di Prailiu, pada tanggal 27 Agustus 2024, pukul 17.40.

Tamu Uumbu Djaka dan Tamu Rambu Margaretha justru menjadi sosok *Maramba* yang dikagumi oleh kaum *Ata* di Prailiu. Dari penuturan mereka, sosok Tamu Uumbu Djaka adalah sosok pemimpin (raja) yang tegas, berwibawa dan menghargai sesama, termasuk kepada kaum *Ata* yang ada di KRP. Sikap dan kepemimpinannya itu membuat kaum *Ata* merasa dihargai dan menaruh hormat terhadap beliau, bukan saja karena beliau sebagai tuan dan raja mereka tetapi juga karena beliau adalah sosok yang memanusiakan manusia. Hal inipun turun ke istri dan anak-anak beliau. Sekalipun mereka adalah keluarga bangsawan, tetapi hal itu tidak serta merta membuat mereka dapat bertindak atau berbuat semena-mena terhadap kaum *Ata* yang ada di KRP. Sebaliknya mereka justru bersikap adil dan tidak melakukan kekerasan kepada kaum *Ata* di sana. Hal inilah yang membuat kaum *Ata* di KRP Kambata tidak pernah membertontak atau melawan bahkan melarikan diri dari KRP.

### **Kaum Ata Sebagai *Subaltern* di Sumba Timur**

Pada tahun 2004, Janet Hoskins seorang Antropolog University of Southern California, AS, menulis tentang relasi *Maramba* dan *Ata* sebagai praktik perhambaan di era modern. Menurutnya, fenomena ini telah berlangsung sangat lama dan memuncak pada era kolonial Belanda.<sup>46</sup> Relasi *Maramba* dan *Ata* dapat dilihat sebagai sebuah relasi kuasa yang dilakukan oleh seorang tuan terhadap seorang hamba atau budaknya. Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki oleh kaum *Maramba* sebagai golongan kelas atas digunakan untuk menindas dan berlaku tidak adil terhadap para *Ata* yang merupakan golongan kelas bawah.

Perhambaan secara historis dibentuk dan dipertahankan oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang kemudian menyebabkan berbagai ketidakadilan dan penindasan serta kekerasan.<sup>47</sup> Hal ini dapat kita lihat melalui tugas dan tanggung jawab para *Ata* dalam melayani tuannya itu. Sebagai seorang hamba, kaum *Ata* dituntut untuk bekerja demi memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dari tuannya. Pekerjaan yang dilakukan kaum *Ata* tersebut antara lain memenuhi dan mengurus segala urusan rumah tangga di rumah tuannya (melakukan pekerjaan domestik), menjaga dan mengembalakan ternak tuannya, bekerja di kebun, di sawah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diberikan oleh tuannya yaitu para *Maramba*. Para *Ata* dituntut untuk selalu patuh dan taat terhadap tuannya, mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, sekalipun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka tidak dapat menolak perintah yang diberikan tuannya. Jika para *Ata* atau hamba melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau perintah tuannya, maka kerap kali mereka harus menerima hukuman dari tuannya, mulai dari hukuman yang cukup ringan seperti kekerasan verbal (kata-kata cacian dan merendahkan/ melecehkan), kekerasan psikis sampai hukuman yang lebih berat misalkan kekerasan fisik (dipukul, dicambuk, dikurung, tidak diberi makan dan lain sebagainya).<sup>48</sup> Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hukuman yang diberikan kepada para *Ata* yaitu: *hondu kandula* berarti digantung sampai mati (untuk dosa besar), *palu wanggu iwi* berarti dipukul dengan rotan (untuk kesalahan kecil) dan *palu ukut kuan* artinya menendang, menghentak, dan memukul. Hukuman lain yang juga umum dialami kaum *Ata* adalah dijual ke *Maramba* yang lain.<sup>49</sup> Kahumbu Nganji salah seorang dari sekian banyak kaum *Ata* di Pulau Sumba menuturkan bahwa sebagai seorang *Ata*, tidak jarang ia dan keluarganya (anak-anaknya) diperlakukan

<sup>46</sup> Hoskins, "Slaves, brides and other 'gifts'," 90-107, DOI: 10.1080/0144039042000293063.

<sup>47</sup> Siti Barokah, "An Ethnographic Investigation of Master Slave Relation in Sumba, Indonesia" (Netherlands: Erasmus, 2016), 2. Dapat diakses juga melalui <http://hdl.handle.net/2105/37349>.

<sup>48</sup> Wawancara dengan ibu M di Prailiu, pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 10.00.

<sup>49</sup> Barokah, "An Ethnographic Investigation of Master Slave Relation in Sumba, Indonesia," 35.

dengan kasar, ditindas, dilecehkan, bahkan dihukum apabila mereka tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sebagai seorang *Ata* dalam melayani tuannya.<sup>50</sup>

Pada umumnya, tidak hanya tenaga *Ata* yang digunakan untuk melakukan segala pekerjaan yang diberikan oleh tuannya, tetapi tubuh merekapun dieksploitasi guna memuaskan nafsu dari tuannya. Mereka bekerja tanpa mendapatkan upah sepeserpun, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan minum serta tempat tinggal diberikan oleh tuannya. Mereka hidup hanya untuk bekerja dan melayani tuannya. Tubuh mereka menjadi milik dari sang tuan dan karena itu mereka tidak mampu untuk menolak atau melakukan perlawanan, sekalipun mereka diperhamba, ditindas dan mengalami kekerasan seksual bahkan harus kehilangan nyawa. Jika seorang *Maramba* atau seorang bangsawan ingin memuaskan hasrat seksualnya, sekalipun telah menikah atau memiliki seorang istri, ia dapat saja melampiaskan hasratnya itu terhadap salah satu dari para *Ata* perempuannya. Para *Ata* atau hamba tersebut tentu saja tidak dapat menolak atau melakukan perlawanan terhadap tuannya itu meskipun para *Ata* tersebut sudah memiliki suami atau sudah berkeluarga. Syane Lubbu menegaskan bahwa perhambaan adalah salah satu bentuk penindasan dan kekerasan, khususnya terhadap kaum perempuan yang berstatus hamba.<sup>51</sup>

Relasi kuasa yang tidak setara dari para *Maramba* terhadap para *Ata* menyebabkan kaum *Ata* menjadi kaum yang terabaikan, terpinggirkan atau termarginalkan dari kehidupan masyarakat Sumba. Kaum *Ata* adalah *subaltern* di tengah masyarakat Sumba. Sebagai *subaltern*, kerap kali mereka ditindas, diperlakukan tidak adil, rentan mengalami kekerasan fisik maupun seksual dan bahkan tubuh mereka dieksploitasi demi dan untuk memenuhi segala kebutuhan atau kepentingan tuannya yaitu para *Maramba*. Fakta bahwa para *Maramba* memiliki kekuasaan dan sebagian besar sumber daya ekonomi dan penghidupan yang dibutuhkan para *Ata*, membuat para *Ata* selamanya tetap akan menjadi hamba atau budak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem perhambaan semacam ini sudah mulai memudar atau tergerus di kalangan masyarakat Sumba. Sumba Timur dapat dikatakan sebagai kabupaten paling feodal yang secara ketat masih mempertahankan dan menerapkan stratifikasi sosial semacam ini, sementara kabupaten-kabupaten lain seperti di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya secara bertahap sudah meninggalkan praktik tersebut. Perlakuan para *Maramba* terhadap para *Ata* pun sedikit demi sedikit sudah mengalami perubahan, seperti yang dilakukan oleh seorang *Maramba* bernama Balla Nggiku di Desa Meuramba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur.<sup>52</sup> Terhadap para *Ata* atau hambanya, mereka sudah diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Bahkan, *Ata* nya yang bernama Kahumbu Nganji menjadi salah seorang staf di kantor desa, sekalipun hanya sebagai seorang pesuruh.<sup>53</sup> Ada perubahan sikap di mana para *Maramba* sekarang sudah lebih peduli dan memanusiakan para hambanya atau *Ata*, seperti yang dilakukan oleh *Maramba* di KRP Ibu Tamu Rambu Margaretha.

Jika dulu para *Ata* tidak diperbolehkan untuk sekolah, maka sekarang para *Maramba* sudah memperbolehkan mereka untuk sekolah bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi, seperti di perguruan tinggi. Bahkan sekarang beberapa *Ata* sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kota, sekalipun mereka tidak memiliki jabatan atau pangkat yang

<sup>50</sup> Ahmad Arif, "Perjuangan Hamba Menjadi Setara."

<sup>51</sup> Syane Rambu Lubbu, *Kekerasan Terhadap Hamba Perempuan di Sumba Timur: Suatu Tinjauan Teologi Feminis* (Yogyakarta: SINTA - Unit Perpustakaan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), 2011), 1.

<sup>52</sup> Ahmad Arif, "Perjuangan Hamba Menjadi Setara."

<sup>53</sup> Ahmad Arif, "Perjuangan Hamba Menjadi Setara."

tinggi. Di KRP Kambata, yang menjadi ketua RT/RW 01/01 yaitu seorang ibu bernama MHM dari golongan *Ata*. Hal ini menunjukkan bahwa para *Ata* sudah mulai mendapat kesempatan untuk mengabdikan atau berkarya dalam pemerintahan, termasuk di tingkat paling rendah RT/RW. Jika dulu para *Ata* kerap kali dipukul atau disiksa karena berbagai alasan, maka sekarang hal-hal tersebut sudah jarang terjadi, terutama sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 39/1999, tentang Hak Asasi Manusia.<sup>54</sup> Hingga dua puluh tahun yang lalu, masih terdapat fenomena seorang hamba yang dikubur hidup-hidup bersama majikannya yang telah meninggal.<sup>55</sup> Namun di era modern seperti sekarang ini, hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam upacara-upacara penguburan para *Maramba*.

Para *Maramba* dalam memperlakukan para *Ata* yang sekarang boleh dikatakan sudah lebih manusiawi dibandingkan pada zaman dulu. Akan tetapi, sekalipun sistem perhambaan ini sudah semakin memudar dan perlakukan para *Maramba* yang juga mengalami perubahan sikap terhadap para *Ata* sudah semakin lebih baik atau lebih beradab, tidak serta merta menghapus sistem perhambaan di Sumba. Dalam perkembangannya sampai pada saat ini, ada hal-hal yang berubah dan ada yang tidak berubah dalam relasi *Maramba* dan *Ata* di Sumba Timur, khususnya di KRP. *Maramba* masih memiliki kekuasaan yang besar dalam struktur sosial melalui legitimasi adat. Sementara perubahan yang terjadi adalah relasi yang semakin egaliter di mana dominasi *Maramba* mulai berkurang dan *Ata* tidak lagi terlalu bergantung pada *Maramba* pada situasi tertentu dikarenakan para *Ata* sudah mulai banyak yang mengembangkan usaha seperti tenun ikat demi menunjang perekonomian keluarga.<sup>56</sup> Di KRP sendiri kaum *Ata* banyak yang memiliki usaha tenun dan hal tersebut turut membantu perekonomian keluarga sehingga mereka tidak lagi terlalu bergantung pada tuannya. Selain itu, kaum *Ata* di KRP Kambata tidak dimarginalkan melainkan mereka dirangkul dan diperlakukan dengan baik sebagai sesama manusia, seperti yang dituturkan MHM pada saat wawancara. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai Kekristenan yang dianut oleh kaum *Maramba* di KRP Kambata sehingga hal tersebut kemudian turut mempengaruhi bagaimana kaum *Maramba* di sana memperlakukan kaum *Ata*.

## **Memperdengarkan Kembali Suara Subaltern di Ruang-Ruang Publik**

Dalam upaya untuk memutus rantai perhambaan di era modern seperti sekarang ini, khususnya di KRP, kaum *Ata* perlu diberikan “ruang” untuk mengemukakan suara-suara mereka yang selama ini tidak terdengar dan pengalaman-pengalaman mereka yang selama ini dibungkam karena ketidakadilan, kekerasan dan dipinggirkan oleh kaum *Maramba* dan masyarakat luas. Seperti yang dikatakan Spivak bahwa meskipun para *subaltern* ini tidak dapat berbicara karena suara dan pengalaman mereka dibungkam oleh kelompok dominan dalam relasi kuasa yang bersifat hirarkis, yang membuat mereka ter subordinasi, namun demikian mereka dapat direpresentasikan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap keadaan mereka, seperti kaum intelektual dan tokoh agama. Peranan dua kelompok masyarakat ini menjadi sangat penting untuk memperjuangkan kelompok-kelompok *subaltern* agar mereka tidak lagi hidup dalam perhambaan. Dalam hal ini peran Gereja Kristen Sumba (GKS) menjadi sangat penting dalam perjuangan untuk memutus dan menghapus praktik perhambaan di Sumba,

---

<sup>54</sup> Barokah, “An Ethnographic Investigation of Master Slave Relation in Sumba, Indonesia,” 18.

<sup>55</sup> Barokah.

<sup>56</sup> Dharma Kelana Putra, “Perubahan Relasi Ata-Maramba Pada Masyarakat Sumba Timur,” *Jurnal Jnana Budaya Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya* Vol. 24 No.2 (Agustus, 2019), 67.

khususnya di KRP, mengingat bahwa kaum *Maramba* dan *Ata* di KRP adalah warga jemaat dari GKS.

Berbicara tentang praktik perhambaan di KRP, kaum *Ata* adalah *subaltern*. Sekalipun saat ini mereka sudah diperlakukan dengan baik dan lebih dihargai dibandingkan kaum *Ata* pada umumnya yang berada di tempat-tempat lain di Sumba Timur, namun hal tersebut menurut penulis, dengan meminjam istilah Karl Max, sekedar sebagai “kesadaran palsu.” Sebab hal tersebut membuat kaum *Ata* di KRP tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelas sosial (golongan terendah) yang membuat mereka seringkali diperlakukan dengan tidak adil, rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Status dan kedudukan mereka sebagai golongan kelas bawah turut menentukan bagaimana orang lain memperlakukan mereka, baik oleh tuannya sendiri (kaum *Maramba*) maupun masyarakat luas di Sumba. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai kaum yang tersubordinasi oleh dominasi kaum *Maramba* sebagai pihak yang *superior*, kehidupan mereka ada dalam kuasa dan kontrol kaum *Maramba*. Mereka tidak dapat hidup bebas sekalipun mereka pergi meninggalkan pulau Sumba karena identitas mereka sebagai seorang *Ata* yang dibawa sejak lahir terus melekat selamanya bahkan sampai keturunan-keturunan mereka.

Dampak negatif dari kesadaran palsu tersebut pada akhirnya menjadi penghalang bagi mereka untuk melihat ketidak-setaraan, penindasan dan marginalisasi yang kerap kali dialami oleh kaum *Ata* pada umumnya. Sehingga sekalipun mereka mendengar dan melihat ada sesama mereka kaum *Ata* yang mengalami ketidakadilan, penindasan dan marginalisasi, mereka seolah-olah tidak peduli karena keadaan mereka berbanding terbalik dengan kaum *Ata* di luar sana. Seperti misalnya ketika ada kaum *Ata* di KRP Kiku yang mengalami kekerasan, kaum *Ata* yang ada di KRP Kambata tidak menunjukkan sikap peduli dan menolong sesama kaum *Ata* yang diperlakukan demikian di KRP.<sup>57</sup> Oleh karena itu menurut hemat penulis, pengalaman-pengalaman kaum *Ata* baik yang mengalami ketidakadilan maupun yang diperlakukan dengan adil, yang mengalami kekerasan maupun tidak, yang termarginalisasi maupun tidak, perlu diberikan “ruang bersama” agar mereka dapat menuturkan kisah-kisah mereka dengan harapan suara-suara mereka yang selama ini diperlakukan dengan tidak adil, mengalami kekerasan, dimarginalisasi dapat terdengar dan pengalaman-pengalaman mereka tidak lagi dibungkam melainkan menjadi dasar atau landasan dalam memperjuangkan keadilan, kehidupan tanpa kekerasan dan merengkuh mereka-mereka yaitu kaum *Ata* sebagai *subaltern* yang selama ini terpinggirkan.

## Kesimpulan

Dari apa yang sudah kami paparkan di atas terkait praktik perhambaan di KRP, ditemukan bahwa latar belakang munculnya praktik tersebut tidak terlepas dari sejarah dan mitos yang ada di Sumba, yang kemudian terkonstruksi menjadi budaya dalam masyarakat melalui stratifikasi sosial serta relasi kuasa yang begitu kuat dalam masyarakat Sumba. Proses ini menempatkan para *Ata* atau hamba dalam posisi yang lebih rendah dari para *Maramba* atau kaum bangsawan. Kekuasaan yang dimiliki oleh para *Maramba* menyebabkan para *Ata* sulit untuk melepaskan diri dari praktik perhambaan. Perhambaan terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang di tengah masyarakat, yang semakin dikukuhkan oleh konstruksi budaya yang menghasilkan stratifikasi sosial di masyarakat itu sendiri. Para *Ata* menjadi *subaltern* karena status dan kedudukan mereka sebagai golongan terendah di masyarakat Sumba. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari status dan kedudukan mereka di masyarakat sebagai

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak L di Prailiu, pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 13.00.

seorang *Ata* atau hamba, sebab mereka adalah kaum-kaum yang terpinggirkan, termarginalkan dan suara serta pengalaman mereka dibungkam demi dan untuk kepentingan para tuannya, yaitu para *Maramba*. Namun, sekalipun praktik perhambaan di KRP sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana kaum *Ata* saat ini sudah diperlakukan dengan adil, tidak lagi mengalami kekerasan dan tidak termarginalisasi, tetapi semua itu hanyalah sebuah kesadaran palsu yang membuat kaum *Ata* di KRP tidak menyadari ketertindasan yang dialami. Mereka tetap menjadi *subaltern* untuk selamanya. Upaya untuk memutus rantai praktik perhambaan tersebut adalah dengan memberi “ruang” bagi kaum *Ata* di KRP agar mereka dapat menyuarakan suara-suara dan pengalaman mereka sebagai *subaltern* di masyarakat Sumba. Dalam upaya tersebut, maka saran atau rekomendasi kami adalah perlu adanya kerja sama di antara seluruh *stakeholder*, baik itu tokoh agama atau gereja, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat luas agar praktik semacam ini tidak lagi terjadi. Di sini, peran Gereja Kristen Sumba, baik dari aras sinode, klasis hingga jemaat sangat penting, mengingat baik kaum *Maramba* maupun kaum *Ata* adalah bagian dari warga jemaat Gereja Kristen Sumba. Gereja Kristen Sumba perlu hadir dan berjuang bersama kaum *Ata* yang selama ini menjadi *subaltern* di tengah masyarakat Sumba Timur untuk mengupayakan pembebasan, sebagaimana tugas dan panggilan gereja untuk membawa pembebasan bagi kaum tertindas dan termarginalkan serta menghapus berbagai bentuk penindasan yang ada di masyarakat, seperti praktik perhambaan yang dilakukan kaum *Maramba* terhadap kaum *Ata* di KRP.

## Referensi

- Aji, Rizqon Halal Syah. “Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* Vol. 2 No. 1 (Juni, 2015), 2015.
- Arif, Ahmah. “Perjuangan Hamba Menjadi Setara,” <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2019/07/17/perjuangan-hamba-menjadi-setara> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 14.47).
- Ama, Kornelis Kewa. “Nasib Perempuan Sumba dan Pengakuan Komunitas Agama Asli Marapu,” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/04/21/nasib-perempuan-sumba-dan-pengakuan-komunitas-agama-asli-marapu> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 17.48), 2022.
- Amma, ESR, DY Meyners, HR Udju. “Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia,” *JIST* Vol. 4. No. 6 (Juni, 2023), 5-654. Dapat diakses di: <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/629/1144>, 2023.
- Barokah, Siti. “An Ethnographic Investigation of Master Slave Relation in Sumba, Indonesia.” *Netherlands: Erasmus*. Dapat diakses juga melalui <http://hdl.handle.net/2105/37349>, 2016.
- Dharma Kelana Putra, Dharma Putra. “Perubahan Relasi Ata-Maramba Pada Masyarakat Sumba Timur,” *Jurnal Jnana Budaya Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya* Vol. 24 No.2 (Agustus, 2019), 2016.
- Echols, John. M. dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris - Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Felle, Jessica Tirza dan Armin Sukri Kana. “Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan Dalam Tradisi Suku Sumba,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2021), 51. Dapat juga dilihat di <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/>, (diakses pada 06 Des 2024, pukul 18.55), 2021.
- Fatmawati, Ira, Nailir R. Sarmadiyah, Devi Z. Rosyidah. (2024). “Stratifikasi Sosial Masyarakat Minang Pada Novel Di Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hamka

- (Stratifikasi Sosial Max Weber),” *Jurnal LESTARI: Bahasa dan Sastra* Vol. 02 No. 02 (April-Juni, 2024), 2024.
- Guha, R, Gayatri C. Spivak. *Selected Subaltern Studies*. New York: Oxford University Press, 1988.
- Hoskins, Janet. “Slaves, Brides and Other ‘Gift’: Resistance, Marriage and Rank in Eastern Indonesia,” *Slavery & Abolition: A journal of Slave and Post-Slave Studies* Vol. 25 No. 2 (Agustus, 2004), 94. <https://doi.org/10.1080/0144039042000293063>, 2004.  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/slave> (diakses pada 05 Des 2024, pukul 09.20).
- Jami, Dorkas dan David Samiyono. *Maramba dan Ata*. Salatiga: Fakultas Teologi UKSW Press, 2009.
- Japalatu, Alex. “Jejak Kolonial di Pulau Sumba: Dari Perang Hingga Sistem Pemerintahan.” Dapat diakses di:  
<https://www.kompasiana.com/alexjapalatu3508/62fc3f8b3555e43a3a252002/jejak-kolonial-di-pulau-sumba-dari-perang-hingga-sistem-pemerintahan> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 06.46).
- Kurniawan, Aloysius Budi. “Jejak Purba Relasi Tuan-Hamba,”  
<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/04/15/jejak-purba-relasi-tuan-hamba> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 12.22).
- Kapita, Oe. H. *Sumba di Dalam Jangkauan Jaman*. Jakarta: BPK GM, 1976.
- Lubu, Syane Rambu. *Kekerasan Terhadap Hamba Perempuan di Sumba Timur: Suatu Tinjauan Teologis Feminis* (Yogyakarta: Katalog UKDW, 2011). Dapat diakses di:  
<http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/5418>, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nie Boer, H. J. *Slavery as an Industrial System: Ethnological Research*. The Hague: Nijhoff, 1980.
- Nanda, Salsabila. “Stratifikasi Sosial: Bentuk, Jenis, Fungsi, dan Sifatnya,”  
<https://www.brainacademy.id/blog/stratifikasi-sosial> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 20.23).
- Muin, Indianto. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Mitchell, Duncan. *Sosiologi: Suatu Analisa Sistem Sosial*. Jakarta: Bina Askara, 1984.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Moniaga, Sandrayati “Perbudakan Masih Ada di Sekitar Kita,”  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/7/2020/perbudakan-masih-ada-di-sekitar-kita.html> (diakses pada 05 Des 2024, pukul 07.25).
- Nuryahman. “Perdagangan Budak di Nusa Tenggara Sampai Pada Abad ke-19.” Bali: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT, 2018.
- Patterson, Orlando. *Slavery and Social Death: A Comparative Study* (Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1982).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ratih, Andri. “Perbudakan Masih Ada di Sekitar Kita,”  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/7/2020/perbudakan-masih-ada-di-sekitar-kita.html> (diakses pada 05 Des 2024, pukul 07.25).
- Sugirtharajah, R. S. *Charting the aftermath: a review of Postcolonial Criticism dalam The Postcolonial Biblical Reader*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sorokin, Pitirim Aleksandrovich. *Social and Cultural Mobility*. London: Free Press, 1959.
- Santosa, Puji. *Kritik Poskolonial: Jaringan Sastra Atas Rekam Jejak Kolonialisme*. Jakarta:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012.
- Spivak, Gayatri C. *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea* Ed. by Rosalind Morris. Columbia: Columbia University Press, 2010.
- Tagukawi, Daniel. "Darurat TPPO, Stop Perbudakan Modern Anak Sumba," <https://sumbanews.com/wp-content/uploads/2023/08/SUMBANEWS-03.pdf> (diakses pada 06 Des 2024, pukul 16.11), 2023.
- Thosibo, Anwar. *Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Twikromo, A. *The local Elite and the Appropriation of Modernity*. Yogyakarta: Kanisius Publishing House, 2008.
- Watson, L. (ed.) *Asian and African System of Slavery*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Wellem, F. D. *Injil & Marapu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2004.
- Walk Free, <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/> (diakses pada 05 Des 2024, pukul 05.40).
- Yiwa, MF. *Maramba dan Ata di Patabahi Sumba Timur Dari Perspektif Pendampingan keIndonesian* (Salatiga: Repositori UKSW, 2023). Dapat diakses di: <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32156>, 2023.
- Yusak B. Setyawan, Yusak B. *The Use of the Haustafel of Ephesians in the Socio-Political Context of Graeco-Roman Society: A Postcolonial Perspective Drowing Upon Indonesian Christianity's Ecounter With the state Ideology of the Pancasila* [dissertation]. Adelaide, Australia: School of Theology Flinders University, 2009.